

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I TAHUN 2025



**Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan
Tahun 2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM.....	3
A. Pelaksana SKM.....	3
B. Metode Pengumpulan Data.....	3
C. Lokasi Pengumpulan Data.....	4
D. Waktu Pelaksanaan SKM.....	4
E. Penentuan Jumlah Responden.....	5
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	7
A. Jumlah Responden SKM.....	7
B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur).....	9
BAB IV ANALISIS HASIL SKM.....	11
A. Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	11
B. Rencana Tindak Lanjut.....	11
C. Tren Nilai SKM.....	14
BAB V KESIMPULAN.....	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	16

KATA PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penerapannya, untuk menilai kualitas pelayanan publik dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian kepuasan masyarakat, terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian antara lain: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif/ produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan.

Dari hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap 15 layanan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa pada periode Semester I tahun 2025 didapatkan jumlah responden sebanyak 326 orang. Dari hasil tersebut maka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan adalah 89.72 dengan kategori SANGAT BAIK. Hasil tersebut diharapkan akan menjadi dasar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan.

Demikian semoga laporan ini dapat memberikan gambaran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Kesehatan.

Pekalongan, 05 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan



Dr. SLAMET BUDIYANTO, S.KM.,S.E.,M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 197101181993031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kesehatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

B. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas Layanan Kesehatan yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

A. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Kesehatan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Kegiatan diawali dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam kegiatan ini, Unit Penyelenggara Pelayanan berperan dalam proses pengumpulan data, dimana pengumpulan data dilakukan secara daring melalui website Survey Kepuasan Masyarakat yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Adapun alamat website SKM Pemerintah Kota Pekalongan adalah <https://skm.pekalongankota.go.id/>. Data yang terkumpul diolah oleh tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Bagian Organisasi Setda untuk menjaga validitas data, sehingga Unit Penyelenggara Pelayanan hanya menerima data dan hasil pengolahan data. Selanjutnya, hasil pengolahan data disampaikan kepada UPP untuk disusun dalam bentuk laporan serta menyusun rencana tindak lanjut atas hasil SKM tersebut.

B. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner daring yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kesehatan yaitu :

1. Persyaratan.
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur.
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian.
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif.
Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan.
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana.
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana.
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

C. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan dimanapun pada saat atau setelah pengguna layanan memperoleh layanan. Pengguna layanan atas petunjuk dari petugas pelayanan dapat mengisi survey secara daring baik pada saat di ruang pelayanan ataupun di kediaman masing-masing. Data yang diinputkan oleh responden secara langsung akan tercatat dan tersimpan dalam ruang penyimpanan (*server*) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

D. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) semester. Persiapan dan pengumpulan data dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dan laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat memerlukan waktu selama 1,5 (satu setengah) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	5
2.	Pengumpulan Data	Januari 2025 s.d Juni 2025	135

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2025	15
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2025	45

E. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pengguna layanan) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan berdasarkan periode survei sebelumnya. Diketahui bahwa selama Semester II Tahun 2024 diketahui jumlah populasi atau pengguna layanan pada Dinas Kesehatan sebanyak 1955 orang.

Berdasar pada jumlah populasi tersebut, kemudian dihitung besaran sampel minimal menggunakan Tabel *Krejcie and Morgan*, dimana diketahui bahwa jumlah sampel minimal selama periode survey Semester I Tahun 2025 adalah 320 orang.

Tabel Penghitungan Jumlah Sampel Minimal oleh Krejcie Morgan

<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377

<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
				100000	
210	136	1100	285	0	384

Note : *N* is population size, *S* is sample size

Source: Krejcie and Morgan, 1970

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 326 orang responden, Berdasar pada jumlah sampel yang diterima tersebut diketahui bahwa tingkat kepercayaan yang dicapai adalah 95.04%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampel yang didapat telah memenuhi tingkat kepercayaan untuk penelitian sosial dengan rentang tingkat kepercayaan yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 95% (*Morgan and Krejcie, 1970*).

Berikut adalah data persebaran berdasarkan karakteristik responden dan karakteristik jawaban responden, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Karakteristik Responden

N O	KARAKTERISTI K	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	Laki	127	38.96%
		Perempuan	199	61.04%
2	USIA	Kurang Dari 20 Tahun	1	0.31%
		20 – 29 Tahun	59	18.10%
		30 – 39 Tahun	144	44.17%
		40 – 49 Tahun	67	20.55%
		Lebih Dari 50 Tahun	55	16.87%
3	PENDIDIKAN	SD Sederajat	26	7.98%
		SMP Sederajat	40	12.27%
		SMA Sederajat	183	56.13%
		Diploma	16	4.91%
		Sarjana	59	18.10%
		S2/S3	2	0.61%
4	PEKERJAAN	TNI/POLRI	1	0.31%
		PNS/PPPK	30	9.20%
		Mahasiswa/ Pelajar	5	1.53%
		Karyawan	29	8.90%
		Wiraswasta	35	10.74%
		Lainnya	226	0.00%

N O	KARAKTERISTI K	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
5	JENIS LAYANAN	Layanan Rujukan PSC 119	19	5.83%
		Layanan Rekomendasi Persetujuan Pemenuhan Standar Toko Obat	0	0.00%
		Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0.00%
		Layanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	0	0.00%
		Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Toko Alat Kesehatan	0	0.00%
		Pelayanan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	32	9.82%
		Pelayanan Jamkesda bagi Masyarakat Miskin	80	24.54%
		Layanan Rekomendasi Persetujuan Pemenuhan Standar Apotek	0	0.00%
		Layanan Fogging Focus DBD	19	5.83%

N O	KARAKTERISTI K	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
		Layanan Rekomendasi Persetujuan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT)	94	28.83%
		Layanan Vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan	0	0.00%
		Layanan Rekomendasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0.00%
		Layanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)	82	25.15%
		Penerbitan Rekomendasi SLHS (Sertifikat Layak Higiene Sanitasi)	0	0.00%

Sumber: Data primer diolah (2025)

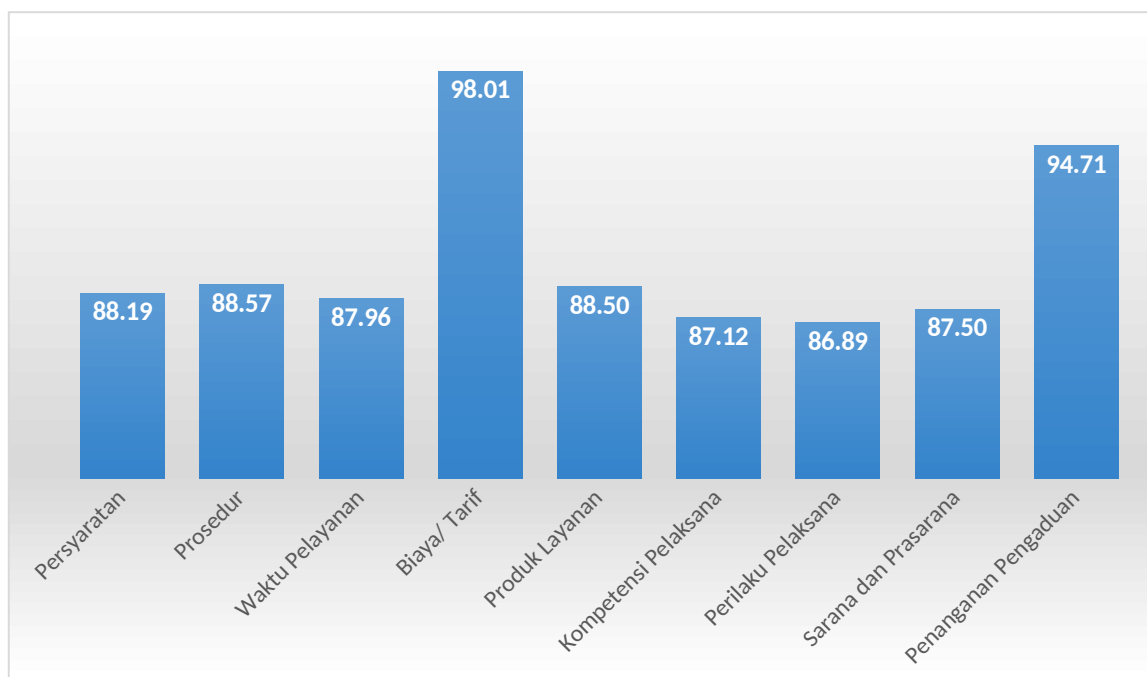
B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur)

Pengolahan data SKM menggunakan alat bantu Microsoft Excel dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	88.19	88.57	87.96	98.01	88.50	87.12	86.89	87.50	94.71
Kategori	B	A	B	A	A	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	89.72 (A atau SANGAT BAIK)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
**Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada
Dinas Kesehatan**



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

A. Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 86.89. Selanjutnya Kompetensi Pelaksana yang mendapatkan nilai 87.12 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sarana Dan Prasarana dengan nilai 87.50 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/ Tarif mendapatkan nilai tertinggi 98.01 dari seluruh unsur layanan, dan Penanganan Pengaduan dengan nilai 94.71 serta Prosedur mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 88.57.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik/masukan pada saat proses pengumpulan data SKM, diperoleh saran/kritik/masukan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. layanan sudah sangat baik, mohon dipertahankan.
2. Diperlukan target waktu penyelesaian untuk setiap tahapan proses (SLA), sehingga pelaku usaha dapat memperkirakan waktu tunggu dengan lebih jelas.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pelaksana pelayanan telah memiliki perilaku sesuai dengan kode etik pelayanan, perlu adanya supervisi dari atasan serta penyegaran secara berkala untuk menjaga perilaku dan sikap pelaksana terhadap pengguna layanan.
2. Pelaksana Pelayanan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, namun demikian setiap pelaksana untuk menjaga konsistensi, fokus, dan konsentrasinya dalam bekerja sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahan.
3. Secara umum sarana dan prasarana telah memadai untuk penyelenggaraan pelayanan, namun demikian terdapat beberapa komponen sarpras yang perlu disediakan agar penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar.

B. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Terhadap Unsur Dengan Nilai Terendah

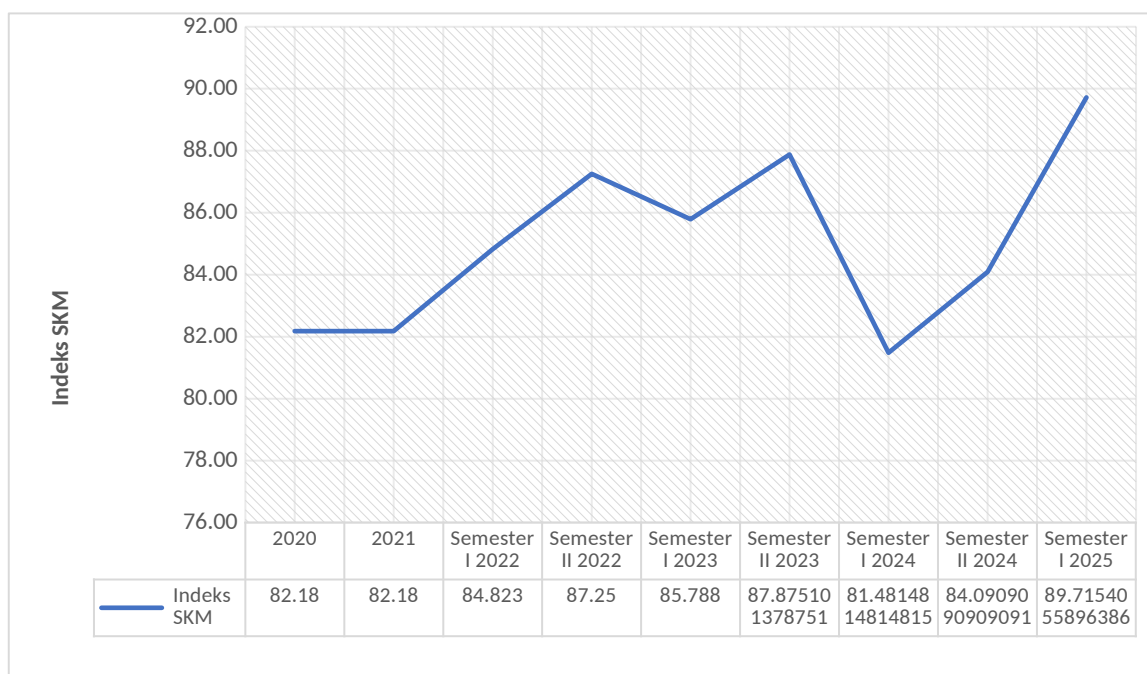
No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Tahun	Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Perilaku Pelaksana	Memberikan pembinaan kepada pelaksana pelayanan agar senantiasa menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun).			√	√	2025	Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kabid SDK dan Farmalkes
		Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pelayanan agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan.						
		Mengusulkan kepada Pimpinan/Perangkat Daerah yang membidangi agar dapat disediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.						
2	Kompetensi Pelaksana	Memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksana pelayanan dengan kinerja yang tidak sesuai harapan agar senantiasa menjaga kode etik pelayanan.			√	√	2025	Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kabid SDK dan Farmalkes

No	Prioritas	Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Tahun	Penanggung Jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Memberikan pelatihan terkait dengan pelayanan kepada pelaksana pelayanan dengan tujuan agar dapat lebih kompeten dalam memberikan pelayanan.						
			Melakukan penataan ruang pelayanan agar menciptakan ruang pelayanan yang nyaman dan kondusif.						
3	Sarana Dan Prasarana		Memberikan pembinaan kepada tim penyelenggara pelayanan agar menguatkan kerjasama dan senantiasa saling mendukung proses pelayanan.			√	√	2025	Kepala Dinas Kesehatan
			Mengadakan pertemuan tim yang dipimpin oleh ketua tim penyelenggara pelayanan dihadiri seluruh anggota tim dengan agenda peningkatan kompetensi teknis pelaksana dalam memberikan layanan.						
			Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna layanan.						

C. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 2. Grafik Tren Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2025 Semester I pada Dinas Kesehatan terjadi fluktuasi persepsi pengguna layanan terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan namun demikian terdapat kenaikan indeks kepuasan masyarakat dibanding dengan periode sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari sampai dengan Juni tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kesehatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang SANGAT BAIK dengan nilai SKM 89.72. Berdasar pada tren nilai SKM dari tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2025, nilai IKM pada Dinas Kesehatan menunjukkan fluktuasi persepsi pengguna layanan terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan namun demikian terdapat kenaikan indeks kepuasan masyarakat dibanding dengan periode sebelumnya.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Perilaku Pelaksana, Kompetensi Pelaksana, dan Sarana Dan Prasarana.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/ Tarif, Penanganan Pengaduan , dan Prosedur.

Pekalongan, 05 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan



Dr. SLAMET BUDIYANTO, S.KM.,S.E.,M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 197101181993031005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1, Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat
Kuesioner SKM disebarakan melalui media website dengan tampilan sebagai berikut :

SKM Beranda

BERANDA
Index - Beranda

**Survei Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kota Pekalongan**

UNIT PELAYANAN PUBLIK & LAYANAN YANG TERSEDIA

-- Pilih Unit Pelayanan Publik --

-- Pilih Layanan --

PROFIL RESPONDEN

Nama Perusahaan / Instansi / Perorangan

No HP

Alamat

Umur ☐ < 20 ☐ 20 - 29 ☐ 30 - 39 ☐ 40 - 49 ☐ >= 50

Jenis Kelamin ☐ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN

Pendidikan ☐ SD/SEDERAJAT ☐ SMP/SEDERAJAT ☐ SMA/SMK/SEDERAJAT ☐ DIPLOMA ☐ S1 ☐ S2/S3 ☐ LA

Pekerjaan ☐ PNS/P3K ☐ TNI/POLRI ☐ KARYAWAN ☐ WIRASWASTA ☐ MAHASISWA/PELAJAR ☐ LAINNYA

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?

☐ Tidak sesuai
Point : 1

☐ Kurang sesuai
Point : 2

☐ Sesuai
Point : 3

☐ Sangat sesuai
Point : 4

Unsur : Persyaratan

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

☐ Tidak mudah
Point : 1

☐ Kurang mudah
Point : 2

☐ Mudah
Point : 3

☐ Sangat mudah
Point : 4

Unsur : Prosedur

<p>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?</p> <div> <div>Tidak cepat Point : 1</div> <div>Kurang cepat Point : 2</div> <div>Cepat Point : 3</div> <div>Sangat cepat Point : 4</div> </div> <p>Unsur : Waktu Pelayanan</p>	<p>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?</p> <div> <div>Sangat mahal Point : 1</div> <div>Cukup mahal Point : 2</div> <div>Murah Point : 3</div> <div>Gratis Point : 4</div> </div> <p>Unsur : Biaya / Tarif</p>
<p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?</p> <div> <div>Tidak sesuai Point : 1</div> <div>Kurang sesuai Point : 2</div> <div>Sesuai Point : 3</div> <div>Sangat sesuai Point : 4</div> </div> <p>Unsur : Produk Spesifikasi Jenis Layanan</p>	<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?</p> <div> <div>Tidak kompeten Point : 1</div> <div>Kurang kompeten Point : 2</div> <div>Kompeten Point : 3</div> <div>Sangat kompeten Point : 4</div> </div> <p>Unsur : Kompetensi Pelaksana</p>
<p>7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?</p> <div> <div>Tidak sopan dan ramah Point : 1</div> <div>Kurang sopan dan ramah Point : 2</div> <div>Sopan dan ramah Point : 3</div> <div>Sangat sopan dan ramah Point : 4</div> </div> <p>Unsur : Perilaku Pelaksana</p>	<p>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?</p> <div> <div>Buruk Point : 1</div> <div>Cukup Point : 2</div> <div>Baik Point : 3</div> <div>Sangat baik Point : 4</div> </div> <p>Unsur : Sarana dan Prasarana</p>

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Tidak ada
Point : 1

Ada tetapi tidak berfungsi
Point : 2

Berfungsi kurang maksimal
Point : 3

Dikelola dengan baik
Point : 4

Unsur : Penanganan Pengaduan

10. Bagaimana pendapat Saudara tentang transparansi pelayanan yang diberikan? (kecukupan informasi mengenai persyaratan, biaya, waktu pelayanan, prosedur dan sebagainya)

Tidak transparan
Point : 1

Kurang transparan
Point : 2

Transparan
Point : 3

Sangat transparan
Point : 4

Unsur : Transparansi Pelayanan

11. Bagaimana pendapat Saudara tentang integritas petugas pelayanan? (terkait suap, pungutan liar, gratifikasi, dan sebagainya)

Petugas tidak berintegritas
Point : 1

Petugas kurang berintegritas
Point : 2

Petugas berintegritas
Point : 3

Petugas sangat berintegritas
Point : 4

Unsur : Integritas Petugas Pelayanan

SARAN & MASUKAN

B I ↶ ↷ ↺ ↻

Kirim Data

© 2022 Bagian Organisasi Kota Pekalongan

Kebijakan Privasi